

BAB II

KURIKULUM NASIONAL MATA PELAJARAN SEJARAH TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

A. Kurikulum Sebagai Acuan Rancangan Pendidikan

Kurikulum mempunyai arti yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen utama dalam pendidikan yang memiliki hubungan erat dan saling mempengaruhi secara signifikan dalam rangkaian antara teoritis dan empiris atau praksis. Hubungan kedua hal tersebut yaitu secara teoritis dan empiris misalnya tampak apabila terjadi suatu reformasi pendidikan (*education reform*) yang biasanya dimulai bisa dari perubahan sistem pendidikan terlebih dahulu yang kemudian menstimulir terjadinya perubahan kurikulum (*curriculum reform*) atau juga bisa dari perubahan kurikulum terlebih dahulu yang kemudian menstimulir terjadinya perubahan sistem pendidikan.¹⁰

Istilah “Kurikulum” memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar yang bersangkutan. Secara “*etimologi*” istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu “*curricula*” yang berarti jalan atau perlombaan yang kemudian diadopsi

¹⁰ Hermans Soemantri. *Perkembangan Kurikulum Sekolah Menengah Atas di Indonesia; Suatu Perspektif Historis dari Masa ke Masa*. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010)., hal. 2

dalam dunia pendidikan menjadi jalan, usaha, kegiatan untuk mencapai tujuan pengajaran.¹¹ Pengajaran yang diberikan merupakan sebuah mata pelajaran (subject) yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pengajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ketempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu.¹² Sebagian orang tidak tahu tentang konsep kurikulum secara pasti, karena banyaknya ahli yang berpendapat mengenai definisi kurikulum, bagi kebanyakan orang kurikulum hanya diartikan sebagai suatu bidang studi. Berikut beberapa definisi kurikulum menurut para ahli ;

W. Carr (1903) dalam bukunya *Reconstruction the Curriculum Debate: An Editorial Introduction, Curriculum studies* mengatakan “Kurikulum dalam definisi tradisional hanya dikaitkan dengan bahan materi yang disampaikan oleh para guru kepada para murid. Dalam hal ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yang praktis, teknis dan diukur dengan keefektifan instrumen pengajaran”.¹³

W. Carr sendiri juga selanjutnya memberikan definisi kurikulum dalam arti yang lebih luas. Ia mengatakan sebagai berikut:

“Kurikulum akan selalu dibuat dan dibuat ulang lagi terus menerus selalu ada penggantian kurikulum yang sebenarnya merupakan sebuah proses dan perjuangan antara para individu dan berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai pandangan-pandangan berbeda tentang kurikulum dan hasil sebuah kurikulum adalah hasil

¹¹ Kaber, Achasius. *Pengembangan Kurikulum*. (Jakarta : Depdikbud Dirjen PTPPLP. 1988), hal. 3

¹² Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta : Bumi Aksara , 2007)., hal. 16.

¹³ W. Carr. *Reconstruction the Curriculum Debate: An Editorial Introduction, Curriculum studies*. 1993., hal. 5

*refleksi sebuah masyarakat yang ingin menciptakan masyarakat yang lebih baik*¹⁴

Selanjutnya Hilda Taba (1962) dalam bukunya yang berjudul *Curriculum Development, Theory and Practice, Hartcourt, Brace and World* mengemukakan pengertian kurikulum yang menitik beratkan pada alat dan bahan yaitu “suatu kurikulum tersusun dari unsur-unsur tujuan, seleksi dan organisasi bahan, kegiatan belajar mengajar dan evaluasi”.¹⁵ Hilda Taba mengemukakan bahwa pada hakikatnya tiap kurikulum merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam masyarakat. Tiap kurikulum bagaimanapun polanya selalu mempunyai tujuan dan sasaran, seleksi dan organisasi bahan serta isi pelajaran, bentuk dan kegiatan belajar mengajar, dan akhirnya evaluasi hasil belajar. Perbedaan kurikulum terletak pada unsur-unsur tertentu.¹⁶

Di Indonesia sendiri istilah kurikulum boleh dikatakan baru menjadi populer sejak tahun empat puluhan, yang dipopulerkan oleh mereka yang memperoleh pendidikan di Amerika Serikat. Kini istilah itu telah dikenal orang di luar pendidikan. Sebelumnya yang lazim digunakan adalah “rencana pelajaran” pada hakikatnya kurikulum sama artinya dengan rencana pelajaran.¹⁷ Di Indonesia pengertian kurikulum terangkum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana definisi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi

¹⁴ *Ibid.*, hal. 7

¹⁵ Kaber, Achasius. *Op Cit.*, hal. 4

¹⁶ S. Nasution. *Op Cit.*, hal. 7

¹⁷ *Ibid.*, hal. 2

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari berbagai macam pengertian kurikulum diatas kita dapat menarik garis besar pengertian kurikulum yaitu Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup dan urutan isi serta proses pendidikan. Ada tiga konsep tentang kurikulum yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem dan kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai substansi berarti kurikulum dipandang sebagai suatu rencana pembelajaran bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum sebagai suatu sistem berarti kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Sedangkan kurikulum sebagai suatu bidang studi mempunyai arti bahwa kurikulum merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan serta pengajaran yang bertujuan mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum.¹⁸

¹⁸ Sukmadinata, Nana Syaodih. *Op Cit.*, hal. 27

Sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa. Apabila dianalisis sifat dari masyarakat dan kebudayaan, dengan sekolah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan operasinya, maka dapat ditentukan paling tidak tiga peranan kurikulum yang sangat penting yaitu yang pertama, *peranan konservatif* dimana kurikulum bertanggung jawab dalam mengajarkan warisan sosial pada generasi muda sehingga sekolah dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Kedua, *peranan kritis atau evaluatif* dimana kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Dan ketiga, *peranan kreatif* yaitu kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan untuk menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.¹⁹

Hakikat kurikulum di negara manapun di dunia ini secara prinsip mempunyai kesamaan, yaitu kurikulum sebagai *blueprint* atau rancangan bagi proses pembelajaran. Rancangan tersebut berupa seperangkat rencana yang digunakan untuk membangun dan memberdayakan potensi peserta didik. Sedangkan perbedaan kurikulum yang dikembangkan setiap negara adalah muatan dalam kurikulum. Perbedaan muatan ini disebabkan oleh filosofi dan *beliefs*, konteks dan kondisi berbeda yang dimiliki dan dihadapi oleh masing-

¹⁹ Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.), hal. 12 – 13.

masing negara.²⁰ Hakikat kurikulum adalah rencana awal yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolah, disajikan dalam bentuk dokumen yang mudah ditemukan, disusun berdasarkan pada tingkat-tingkat generalisasi dan perkembangan peserta didik, dapat diatualisasikan di dalam pembelajaran, dapat diamati oleh pihak yang tidak berkepentingan sekalipun dan membawa misi perubahan tingkah laku.

Kurikulum sebagai suatu bentuk rencana harus bersifat fleksibel agar bisa memberi kemungkinan setiap saat untuk diperlukan perbaikan dalam implementasinya. Kurikulum sebagai suatu bentuk dokumen harus memberikan petunjuk yang cukup rinci mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah dan guru yang dapat disimpan dalam perangkat komputer sehingga bisa diakses oleh berbagai pihak melalui jaringan internet.²¹

Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa landasan yang harus dijadikan dasar pijakan dalam mengembangkan kurikulum oleh berbagai pihak yang terkait dalam merancang maupun melaksanakan pendidikan terutama dalam mengembangkan isi maupun dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga program pendidikan/kurikulum yang diterapkan memiliki nilai manfaat yang optimal bagi siswa, masyarakat, bangsa dan Negara. Landasan-landasan itu antara lain adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis dan landasan teknologis.

²⁰ Hermana Somantrie. *Op. Cit.*, hal. 38

²¹ *Ibid.*, hal. 39- 40

Landasan Filosofis. Pada dasarnya, kurikulum dibuat sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat suatu bangsa, sehingga kurikulum yang dikembangkan juga harus mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut.²² Sebagai contoh pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, maka kurikulum pendidikan yang dianut pada saat itu berpusat pada kepentingan bangsa Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, maka orientasi kurikulum disesuaikan dengan kepentingan bangsa Jepang termasuk sistem nilainya. Lalu setelah Indonesia merdeka secara penuh, maka sistem pendidikan atau kurikulum yang dibentuk berdasarkan dan disesuaikan dengan falsafah Indonesia yaitu Pancasila.

Landasan Psikologis. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu manusia dalam sekolah berarti antara peserta didik dengan pendidik dan juga antara peserta didik dengan orang-orang lainnya yang masing-masing memiliki perbedaan kondisi psikologis. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan tahap perkembangan baik dari latar belakang sosial budaya, juga karena faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya. Oleh karena itu pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi perkembangan dan psikologi belajar yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik serta bagaimana peserta didik belajar.²³

²² Tim Pengembang MKDP. *Kurikulum dan Pembelajaran*. (Jakarta: Rajawali Press. 2011)., hal.

21

²³ *Ibid.*, hal. 26

Landasan sosiologis. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum.²⁴ Landasan sosiologis menjadi sangat penting dalam pengembangan kurikulum karena setiap anak semenjak dari dilahirkan sampai besar dan tua nanti tidak terlepas dari lingkungan social masyarakat. Anak-anak mendapat pendidikan baik informal, formal ataupun non formal dari dalam lingkungan masyarakat dan nantinya mereka akan diarahkan untuk mampu terjun dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. *Landasan teknologis.* Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi/materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Hal ini mengakibatkan secara tidak langsung menuntut pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan.

Kurikulum sebagai acuan rancangan pendidikan berarti merupakan suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program tersebut para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dalam hal

²⁴ *Ibid.*, hal. 36

ini, sekolah sebagai sarana bagi siswa untuk mendapatkan kesempatan belajar. Itu sebabnya kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud tersebut dapat tercapai.

Kurikulum tidak hanya terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja tetapi juga meliputi segala sesuatu yang dapat memberikan pengaruh dalam perkembangan siswa seperti perpustakaan, alat-alat pelajaran, halaman/lapangan sekolah, aula sekolah, gambar-gambar/lukisan dan lain-lain yang dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara efektif. Setiap kegiatan yang akan dan perlu dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran, direncanakan dalam suatu kurikulum. Kurikulum yang dibuat harus memberikan gambaran tentang kehidupan bangsa di masa mendatang. Gambaran kulaitas kehidupan di masa mendatang itu kemudian dibandingkan dengan kualitas kehidupan masa kini. Perbedaan itu yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kualitas yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Atas dasar kualitas yang telah diidentifikasi maka kurikulum mengembangkan rancangannya dalam bentuk ide kurikulum. Ide kurikulum ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi dokumen kurikulum yang didalamnya terdapat berbagai komponen kurikulum.²⁵

Pendidikan sejarah merupakan mata pelajaran dan materi kurikulum yang tercantum dalam dokumen kurikulum. Apabila sudah dapat ditentukan kualitas yang harus dikembangkan oleh kurikulum maka barulah kemudian

²⁵ S. Hamid Hasan. *Kurikulum Pendidikan Sejarah Berbasis Kompetensi*. (Makalah Pendidikan Sejarah UNNES). Diseminarkan di Jurusan Pendidikan Sejarah UNNES tanggal 16 April 2007

dapat diajukan pertanyaan berupa seberapa banyak generasi mendatang harus mempelajari dan menguasai materi sejarah.

B. Kurikulum Nasional 1994 Mata Pelajaran Sejarah Tingkat Sekolah Menengah Atas

Sebagai perwujudan dari kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai suatu sistem telah diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Pasal 37 No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) maka semua upaya pendidikan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut memuat aspek antara lain; *pertama*, hakikat pendidikan yaitu pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. *Kedua*, pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. *Ketiga*, fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. *Keempat*, Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab

kemasyarakatan dan kebangsaan.²⁶ Pada pasal 1 butir 9 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah “Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar”.²⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagai pedoman pelaksanaannya, maka kurikulum Sekolah Menengah Umum perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga perlu ditetapkan Kurikulum Sekolah Menengah Umum baru dimana kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Kurikulum 1994 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Fuad Hasan) tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun pelajaran 1994/1995 yang kemudian kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum 1994. Kurikulum 1994 adalah seperangkat rencana/peraturan yang menekankan pada cara belajar siswa aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna memperoleh hasil belajar yang

²⁶ Hermans Somantrie. *Op Cit.*, hal. 166

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 Pasal 1 butir 9

berupa perpaduan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan²⁸ sehingga kurikulum ini juga dikenal dengan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif).

Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menitikberatkan pada keaktifan siswa, yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Pada hakikatnya, keaktifan belajar terjadi dan terdapat pada semua perbuatan belajar, tetapi kadarnya yang berbeda tergantung pada jenis kegiatannya, materi yang dipelajari dan tujuan yang hendak dicapai.²⁹ Setiap kegiatan melibatkan intelektual emosional siswa dalam proses pembelajaran melalui asimilasi dan akomodasi kognitif untuk mengembangkan pengetahuan, tindakan, serta pengalaman langsung dalam rangka membentuk keterampilan (motorik, kognitif dan sosial), penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap.³⁰

Sedikitnya terdapat lima ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994³¹ yaitu: *pertama*, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan yang membagi waktu belajar satu tahun menjadi tiga bagian (1 tahun = 3 catur wulan) dimana pembelajaran di sekolah ini lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi). *Kedua*, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus

²⁸ Usman, Muhammad Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1992), hal.17

²⁹ Hamalik, Oemar. *Kurikulum dan Pembelajaran*. *Op Cit.*, hal. 137

³⁰ Joni, T. R. *Pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif*. (Jakarta: Balitbang Depdikbud. 1991), hal. 2

³¹ rbaryans.wordpress.com/.../16/bagaimanakah-perjalanan-kurikulum-nasional-pada-pendidikan-dasar-dan-menengah/ - 108k. Diunggah pada tanggal 30 November 2011, pukul 19.22

dapat mengembangkan pengajaran sendiri yang disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. *Ketiga*, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa, guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan. *Keempat*, dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berfikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. *Kelima*, pengajaran dari hal yang kongkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pematapan pemahaman siswa.

Program pengajaran Sekolah Menengah Umum terdiri dari program pengajaran umum dan program pengajaran khusus.³² Program pengajaran umum diselenggarakan di kelas I dan II SMU, sedangkan program pengajaran khusus mulai diadakan di kelas III SMU. Untuk pembelajaran sejarah dalam kurikulum 1994 ini terdapat mata pelajaran yang bernama Sejarah Nasional dan Sejarah Umum yang dipelajari dari kelas I sampai kelas III. Sejarah

³² *Kurikulum Sekolah Menengah Umum: Landasan, Program dan Pengembangan*. (Jakarta: Depdikbud. 1993), hal. 5

Nasional dan Sejarah Umum ini masuk ke dalam program pengajaran umum dimana dalam setiap minggunya diberikan waktu 2 jam pelajaran.³³

Mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah umum adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan mengenai perkembangan masyarakat dari masa lampau sampai masa kini di Indonesia dan di luar Indonesia yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan lanjutan tentang sejarah nasional dan sejarah umum untuk lebih memahami dan menghayati jati diri bangsa serta menumbuhkan wawasan hubungan antarbangsa dengan tujuan untuk menanamkan pemahaman tentang adanya perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta bangsa sebagai warga bangsa Indonesia dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antarbangsa di dunia.³⁴

Dalam pembelajaran sejarah nasional dan sejarah umum digunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan faktual, pendekatan prosesual dan pendekatan pemecahan masalah/kausal.³⁵ Ketiga pendekatan ini digunakan untuk menjawab persoalan apa, siapa, kapan, bagaimana dan mengapa. Penilaian dalam pembelajaran sejarah nasional dan sejarah umum di SMU ditekankan pada aspek pemahaman pengetahuan dan sikap.³⁶ Untuk penilaian terhadap pemahaman dapat dilakukan dengan tes tertulis atau lisan,

³³ *Ibid.*, hal. 10-14

³⁴ Depdikbud. *Kurikulum 1994 GBPP SMU; Mata Pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum*. (Jakarta: Balitbangdikbud. 1994)., hal. 1

³⁵ Depdikbud. *Kurikulum 1994 Pendidikan Menengah, Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah Umum*. (Jakarta: Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan. 1994)., hal 24

³⁶ *Ibid.*

sedangkan untuk penilaian terhadap sikap dapat dilakukan dengan pengamatan atas sikap dan perilaku atau penugasan.

Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (*content oriented*), diantaranya adalah beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran, materi pelajaran dianggap sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berfikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari.³⁷ Permasalahan tersebut terasa saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut.

Salah satu upaya penyempurnaan tersebut yaitu diberlakukannya Suplemen Kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu penyempurnaan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.

³⁷ rbaryans.wordpress.com/.../16/bagaimanakah-perjalanan-kurikulum-nasional-pada-pendidikan-dasar-dan-menengah/ - 108k. Diunggah pada tanggal 30 November 2011, pukul 19.22

Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi dan sarana/prasarana termasuk buku pelajaran. Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikan dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana serta prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. Penyempurnaan terjadi disetiap mata pelajaran termasuk sejarah terutama saat berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia.

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, timbul permasalahan dalam pendidikan sejarah. Masyarakat umum dan para pelajar mulai mempertanyakan mengenai kebenaran sejarah seperti peristiwa Gerakan 30 September, Surat Perintah Sebelas Maret, Awal Orde Baru, Integrasi Timor Timur.³⁸ Mereka mulai mempertanyakan manakah sejarah yang harus dipercaya, informasi yang diberikan dari sekolah atau yang mereka baca dari berbagai media massa.³⁹ Masyarakat terutama para pelajar mulai mengalami kebingungan dengan situasi sejarah yang dihadapi. Selain itu para guru juga menghadapi kesulitan mengenai pokok bahasan krisis dan informasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persoalan lingkungan hidup. Para guru sejarah dalam memberikan informasi menjadi beragam, ada yang mempercayai informasi yang terdapat dalam buku pelajaran, ada juga yang merasa tidak yakin dengan kebenaran informasi dalam buku pelajaran dan mempertanyakan fakta sebenarnya.

³⁸ Depdikbud. *Kurikulum 1994 Suplemen GBPP Mata Pelajaran Sejarah*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 1999)., hal. 1

³⁹ Adam, Asvi Warman. *Bagaimana Menyelesaikan Kontroversi Sejarah*. (Jakarta: Tempo 26 Maret 2007)

Situasi yang penuh keraguan dalam masyarakat tentunya tidak bisa dibiarkan terus berlarut, hal ini dapat berdampak negatif, salah satunya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelajaran sejarah. Ketidakpercayaan terhadap sejarah ini akan berdampak buruk terhadap kebersamaan sebagai suatu bangsa yang telah dibangun oleh perjalanan panjang peristiwa-peristiwa sejarah. Untuk mengatasi situasi yang tidak diinginkan tersebut, maka pemerintah melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap beberapa materi pelajaran sejarah. Hasil dari peninjauan dan penyempurnaan tersebut tertuang dalam suplemen Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bulan Juli 1999. Bahan pengajaran sejarah ini dikembangkan sebagai bahan bacaan guru. Materi bahan ajar ini disusun mengacu pada tulisan yang disusun oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tulisan ini akan diterbitkan secara terpisah sebagai bahan bacaan tambahan atau referensi bagi para guru.⁴⁰

Materi yang dikembangkan sebagai suplemen bahan pengajaran sejarah ini bertujuan untuk membantu guru sejarah dalam proses belajar sejarah agar guru dapat memiliki fakta yang lebih akurat, dikaji dan teruji serta disetujui oleh para sejarawan tentang peristiwa Gerakan 30 September, Surat perintah Sebelas Maret, Awal Orde Baru dan Integrasi Timor Timur. Guru juga dapat menjelaskan bahwa ada kerancuan antara fakta dan

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 2

penafsiran yang terdapat dalam berbagai sumber informasi baik buku pelajaran maupun media massa, sehingga kerancuan tersebut tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan dari masyarakat dan peserta didik terhadap pendidikan sejarah. Selain itu, proses belajar yang berkenaan dengan peristiwa sejarah kontemporer dapat dikembangkan sesuai dengan sifat materi sejarah kontemporer yang rentan terhadap pengkajian kebenaran fakta dan timbulnya tafsiran baru.⁴¹

C. Kurikulum Nasional (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 2004 Mata Pelajaran Sejarah Tingkat Sekolah Menengah Atas

Perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di dunia menuntut diperlukannya perubahan sistem pendidikan di Indonesia guna mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tersebut. Perubahan sistem pendidikan tersebut tentunya tidak terlepas dari perubahan dan penyempurnaan kurikulum nasional yang berlaku di Indonesia yang berfungsi sebagai acuan rancangan pendidikan.

Kurikulum merupakan perangkat pendidikan yang dinamis, oleh karena itu kurikulum juga harus peka dan sekaligus mampu merespon beragam perubahan dan beragam tuntutan yang menginginkan adanya peningkatan kualitas pendidikan. Atas dasar tuntutan untuk mewujudkan masyarakat yang berkompeten maka diperlukan adanya peningkatan mutu

⁴¹ *Ibid.*

pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup perkembangan dimensi manusia pengembangan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki ketangguhan, kemandirian dan jati diri yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran dan atau pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu pada tahun 2004 diberlakukan kurikulum baru yang disebut sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi, hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar-mengajar, serta pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah.⁴² KBK merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.⁴³

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan kurikulum pendidikan yang menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dari suatu jenjang pendidikan. Kompetensi lulusan suatu jenjang pendidikan, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, mencakup

⁴² *Ibid.*, hal. 7

⁴³ E, Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep Karakteristik dan Implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004)., hal. 39

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, memiliki nilai-nilai etika, estetika, demokrasi, toleransi, humaniora, menguasai ilmu, teknologi, kemampuan akademik, keterampilan berkomunikasi, kecakapan hidup, beradaptasi dengan perkembangan lingkungan sosial dan budaya, kemandirian, kreatifitas, kesehatan jasmani maupun rohani dan kewarganegaraan.⁴⁴ Kurikulum Berbasis Kompetensi mencangkup seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi, hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar-mengajar, serta pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah.⁴⁵

Tujuan dari KBK adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa datang dengan mengembangkan sejumlah kecakapan hidup (*life skill*). Kecakapan hidup (*life skill*) adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.⁴⁶ Depdiknas (2002) mengemukakan bahwa KBK memiliki karakteristik sebagai berikut⁴⁷ :

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Hal ini berarti bahwa KBK merupakan

⁴⁴ Depdiknas. *Kurikulum 2004 Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Sejarah*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum. 2003)., hal 1

⁴⁵ Depdiknas. *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Op. Cit.*, hal. 13

⁴⁶ Sanjaya, Wina. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. (Jakarta: Kencana. 2006)., hal. 12

⁴⁷ Depdiknas. *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Op. Cit.*, hal. 8

sejumlah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dimana kompetensi inilah yang selanjutnya dinamakan standar minimal atau kemampuan dasar.

2. Berorientasi pada hasil belajar (*learning aoutcomes*) dan keberagaman. Maksudnya adalah keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar yang selanjutnya dijadikan acuan tercapainya suatu kompetensi yang diharapkan pada siswa.
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Ini berarti bahwa KBK menyadari akan keberagaman siswa sehingga pendidik dalam memberikan metode pelajaran harus bersifat multimetode agar dapat merangsang kemampuan belajar siswa secara maksimal.
4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Artinya, guru dalam pembelajarn bukanlah satu-satunya sumber belajar, guru disini berperan sebagai fasilitator untuk memudahkan siswa belajar dari berbagai macam sumber belajar.
5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Ini berarti keberhasilan pembelajaran KBK tidak hanya diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai isi atau materi pelajaran, melainkan juga bagaimana cara mereka menguasai pelajaran tersebut.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk inovasi kurikulum yang ditetapkan berdasarkan pada Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999 – 2003, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom.⁴⁸ Jika selama ini kebijakan pengembang pendidikan dilakukan secara terpusat (*sentralistik*), di mana semua kebijakan mulai dari kurikulum sampai pedoman pelaksanaan teknis ditangani oleh pusat. Maka, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah dan kewenangan daerah.⁴⁹

Ada 3 pokok landasan teoritis yang mendasari Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) terhadap pembelajaran: pertama pembelajaran yang menekankan kegiatan individu yang membedakan dengan individu lainnya, kedua perlu diupayakan lingkungan belajar yang kondusif dengan media bervariasi, ketiga pemberian waktu yang cukup dalam pengerjaan tugas-tugas.⁵⁰ KBK diberlakukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, mengantisipasi perubahan-perubahan global pada era persaingan bebas serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya informasi, maka dari itu sistem pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan dan

⁴⁸ Hermana Soemantri. *Op Cit.*, hal 197 - 198

⁴⁹ Depdiknas. *Pelayanan Profesional Kurikulum 2004; Kurikulum Berbasis Kompetensi. Op Cit.*, hal. 9

⁵⁰ E. Mulyasa. *Op Cit.*, hal. 154

kebutuhan individu serta mampu membekali siswa dengan sejumlah kemampuan (kompetensi) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.⁵¹ Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas, kritis, kreatif, rasional, mandiri dan mampu dan siap bersaing untuk menghadapi berbagai macam tantangan.

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, pengaturan waktu belajar di semua jenjang dan jenis pendidikan dasar dan menengah menggunakan sistem semester, yaitu sistem yang membagi waktu belajar satu tahun pelajaran ke dalam 2 periode belajar. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, fungsi dan tujuan pendidikan nasional diwujudkan ke dalam standar nasional dan kurikulum. Standar nasional meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.⁵² Standar nasional ini kemudian dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum meliputi pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum, seperangkat bahan kajian, mata pelajaran, pedoman, silabus, dan bahan ajar.⁵³

Implikasi penerapan pendidikan berbasis kompetensi adalah perlunya pengembangan silabus dan sistem penilaian yang menjadikan peserta didik mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengintegrasikan *life skill* (kecakapan

⁵¹ Sanjaya, Wina. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. *Op.Cit.*, hal. 10

⁵² Hermana Somantrie. *Op Cit.*, hal 205.

⁵³ *Ibid.*, hal. 206

hidup). Silabus adalah acuan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran, sedangkan sistem penilaian mencakup indikator dan instrumen penilainnya, meliputi jenis tagihan, bentuk instrument dan contoh instrument. Jenis tagihan adalah berbagai bentuk ulangan dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik, sedangkan bentuk instrument terkait dengan jawaban yang harus dikerjakan oleh peserta didik, baik dalam bentuk tes maupun non-tes.⁵⁴

Menurut Masnur Muslich (2009) Dalam pengembangan silabus harus didasarkan pada prinsip-prinsip,⁵⁵ antara lain:

1. Ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan dimana untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut dalam penyusunan selayaknya dilibatkan para pakar di bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran.
2. Relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai atau ada keterkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, social, emosional dan spiritual peserta didik.
3. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.

⁵⁴ Depdiknas. *Kurikulum 2004 Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Sejarah. Loc Cit*

⁵⁵ Muslich, Masnur. *KTSP, Dasar Pemahaman dan Pengembangan. Jakarta: Bumi Aksara. (Jakarta: Bumi Aksara. 2009).*, hal. 25-26

4. Konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem penilaian.
5. Memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.
6. Aktual dan Konstektual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi.
7. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.
8. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah (kognitif, afektif dan psikomotorik)

Sejarah sebagai salah satu mata pelajaran wajib di SMA juga mengalami pembaharuan yang disesuaikan dengan KBK. Pembaharuan kurikulum mata pelajaran sejarah perlu dilakukan, karena kurikulum yang berlaku sebelumnya yaitu kurikulum 1994 bersifat sentralistik, bermuatan materi yang berlebihan, tumpang tindih pada satuan pendidikan yang berbeda, dan tidak memiliki kompetensi yang jelas. Berdasarkan pemahaman bahwa sejarah merupakan ilmu yang mempelajari proses perubahan dan keberlanjutan dalam dimensi waktu, maka pengajaran sejarah di sekolah perlu

dilaksanakan untuk membangun pemahaman keilmuan berperspektif waktu, memori bersama, dan kesadaran terhadap nilai inti bangsa.

Melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi diharapkan pengajaran sejarah mampu mengembangkan kompetensi siswa untuk berfikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa ditengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. Menurut Depdiknas (2003) pada tingkat SMA, pengajaran sejarah bertujuan⁵⁶ :

1. Mendorong siswa berpikir kritis-analitis dalam memanfaatkan pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini dan yang akan datang.
2. Memahami bahwa sejarah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.
3. Mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan untuk memahami proses perubahan dan keberlanjutan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan diatas, pelaksanaan KBK secara serentak dan resmi oleh seluruh sekolah-sekolah di Indonesia dilakukan pada tahun 2004, namun baru berjalan 2 tahun pemerintah menerapkan kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Menurut Anan (2008) penyebab berubahnya kurikulum 2004 (KBK) ke kurikulum KTSP karena KBK tidak

⁵⁶ Depdiknas. *Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Sejarah SMA dan MA*. (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. 2003)., hal 12

menunjukkan hasil yang signifikan karena berbagai faktor yaitu konsep KBK belum dipahami secara benar oleh guru, draft kurikulum yang terus menerus mengalami perubahan, belum adanya panduan strategi pembelajaran yang mumpuni (mayoritas masih berbasis materi) yang bisa dipakai sebagai pegangan guru ketika akan menjalankan tugas instruksional bagi siswanya.⁵⁷ KBK 2004 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana bahwa peran pendidikan harus mampu mengantarkan peserta didik untuk hidup pada zaman mereka, serta memiliki wawasan global dan mampu berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk dapat menuju karakteristik kurikulum ideal tersebut maka penyusunan kurikulum tidak lagi selayaknya dilakukan oleh negara dan diberlakukan bagi seluruh satuan pendidikan tanpa melihat kondisi internal dan lingkungannya. Kurikulum hendaknya disusun dari bawah oleh setiap satuan pendidikan.

D. Kurikulum Nasional (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006 Mata Pelajaran Sejarah Tingkat Sekolah Menengah Atas

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum terbaru di Indonesia yang disarankan untuk dijadikan rujukan oleh para pengembang kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan

⁵⁷ Anan. *Perbedaan KBK 2004 dengan KTSP*. Artikel 27 Mei 2008. <http://sertifikasiprofesi.blogspot.com/2007/05/perbedaan-kbk-2004-dengan-ktsp.html>. (Diunggah pada tanggal 13 Oktober 2011 pukul 12.11)

standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).⁵⁸ Pengertian KTSP ini mengandung makna bahwa kurikulum dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan tujuan agar satuan pendidikan yang bersangkutan dapat mengembangkan kekhasan potensi sumber manusia dan daerah di sekitarnya.

Apabila dianalisis konsep pengertian diatas, maka ada beberapa hal yang berhubungan dengan makna kurikulum operasional. Pertama, sebagai kurikulum yang bersifat operasional maka dalam pengembangannya, KTSP tidak lepas dari ketetapan-ketetapan yang telah disusun pemerintah secara nasional. Artinya, walaupun daerah diberi kewenangan itu hanya sebatas pada pengembangan operasionalnya saja, sedangkan yang menjadi rujukan pengembangannya itu sendiri ditentukan oleh pemerintah misalnya jenis mata pelajaran beserta jumlah jam pelajarannya, isi dari setiap mata pelajaran itu sendiri, serta kompetensi yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran itu sendiri.

Kedua, sebagai kurikulum operasional, para pengembang KTSP dituntut dan harus memperhatikan ciri khas kedaerahannya sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 ayat 2 dimana bahwa setiap kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.⁵⁹

Persoalan ini penting untuk dipahami karena walaupun standar isi ditentukan

⁵⁸ BSNP. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. (Jakarta: Pusat Kurikulum. 2006)., hal. 5

⁵⁹ Depdiknas. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2003 ayat 2

oleh pemerintah akan tetapi dalam operasional pembelajarannya yang direncanakan dan dilakukan oleh guru dan pengembang kurikulum tidak terlepas dari keadaan dan kondisi daerah.

Ketiga, sebagai kurikulum operasional, para pengembang kurikulum di daerah memiliki keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum menjadi unit-unit pelajaran. KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan dan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. KTSP merupakan kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, oleh sebab itu kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Landasan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini adalah berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ketentuan dalam UU 20/2003 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2);

Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).⁶⁰

2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan standar isi. Ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20.⁶¹

3. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

Standar Isi (SI) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam SI adalah : kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.⁶²

4. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Depdiknas. *Standar Nasional Pendidikan*. (Jakarta: Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005).

⁶² Depdiknas. *Standar Isi*. (Jakarta: Permendiknas No. 22 Tahun 2006.)

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.⁶³

5. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23.

Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya dikemukakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum sesuai standar yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan dengan memperhatikan panduan penyusunan KTSP pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).⁶⁴

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus

⁶³ Depdiknas. *Standar Kompetensi Lulusan*. (Jakarta: Permendiknas No. 23 Tahun 2006).

⁶⁴ Depdiknas. *Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan*. (Jakarta: Permendiknas No. 24 Tahun 2006)

dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP .

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk :

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.⁶⁵

Pelaksanaan serta penerapan KTSP dalam sistem pendidikan Indonesia bukan hanya sekedar pergantian kurikulum, tetapi juga menyangkut perubahan secara mendasar dalam sistem pendidikan. Penerapan KTSP menuntut perubahan paradigma dalam pembelajaran dan persekolahan, karena dengan penerapan KTSP tidak hanya menyebabkan perubahan konsep, metode, dan strategi guru dalam mengajar, tetapi juga menyangkut pola pikir, filosofis, komitmen guru, sekolah, dan *stakeholder* pendidikan.

⁶⁵ E, Mulyasa. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. (Bandung: Rosda. 2010)., hal. 22

Pengembangkan KTSP sejalan dengan kebijakan pemerintah serta terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi yang luas pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.⁶⁶ Pemberian otonomi yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum.⁶⁷ Dijelaskan pula bahwa pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih relevan dan kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan pendidikan di sekolah.⁶⁸ Otonomi yang diberikan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran menciptakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf sekolah.

Pada KTSP ini sekolah memiliki otoritas dan tanggung jawab penuh dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran yang tentunya akan disesuaikan dengan visi, misi, tujuan pendidikan dari sekolah yang bersangkutan serta tujuan pendidikan secara nasional. Sekolah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan dan mengembangkan standar

⁶⁶ Umaedi. *Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Sekolah Menengah Atas*. (Jakarta: Dirjendikdasmen. 2001)., hal. 3

⁶⁷ E, Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: Rosda Karya. 2006)., hal. 10

⁶⁸ <http://www.puskur.net/index.php?menu=profile&pro=78&iduser=5>., (Diunggah pada tanggal 24 November 2011 pukul 12.38)

kompetensi dan kompetensi dasar kedalam indikator kompetensi, mengembangkan strategi, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah.⁶⁹

Dalam KTSP, pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah, serta komite sekolah dan dewan pendidikan. Hal ini menjadikan mereka akan sangat bersahabat dengan kurikulum tersebut. Diasumsikan demikian karena mereka akan terlibat secara langsung dalam proses penyusunannya, dan para guru yang akan melaksanakannya dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga akan memahami betul apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran sehubungan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dimiliki oleh setiap satuan pendidikan di daerah masing-masing.

Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, guru diposisikan sebagai fasilitator dan mediator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik dan maksimal. Perhatian utama pada siswa yang belajar, bukan pada disiplin atau guru yang mengajar. Fungsi fasilitator atau mediator begitu berarti, yaitu; pertama, menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam membuat rancangan dan proses, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya; kedua, menyediakan sarana yang merangsang siswa berpikir

⁶⁹ E, Mulyasa. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. (Bandung: Rosda. 2010)., hal. 21-22

secara produktif, menyediakan kesempatan dan pengalaman konflik; ketiga, memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa jalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa berlaku untuk menghadapi persoalan baru. Guru membantu mengevaluasi hipotesis dan kesimpulan siswa.⁷⁰

Berkembangnya KBK menjadi KTSP pastinya juga berpengaruh pada perkembangan setiap mata pelajaran, karena rancangan pengajaran setiap mata pelajaran dibuat dan dikembangkan sendiri oleh guru bidang studi masing-masing berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Setiap guru bidang studi diwajibkan untuk menyusun silabus dan RPP dimana didalamnya guru menentukan indikator, materi pokok dan metode pembelajaran. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan siswa yang tentunya dapat dinilai sendiri oleh guru. Mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

⁷⁰ Sutrisno dan Nuryanto. *Makalah Profil Pelaksanaan KTSP di Jambi*. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas. 2008)., hal. 12